PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Batu Sisir Bukit Arai Gedung D Pulau Subi Kecil, Natuna, Kepulauan Riau 29783
Laman bpkad.natunakab.go.id Pos e-mail : bpkpd.natuna@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 61 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN JEJARING DAN AKTOR PENERAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK INFIS PERSEDIAAN (INFORMASI PERSEDIAAN TERINTEGRASI) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NATUNA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tata 1ppara pengelolaan persediaan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi, Pemerintah Kabupaten Natuna telah mengembangkan inovasi pelayanan 1ppara INFIS Persediaan;

b. bahwa keberhasilan implementasi INFIS Persediaan memerlukan sinergi, koordinasi, dan kolaborasi yang berkesinambungan antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, perangkat daerah pendukung teknologi informasi, aparat pengawasan intern pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya;

c. bahwa untuk membangun koordinasi, memperkuat pembinaan, mempercepat penyelesaian permasalahan implementasi, serta menjamin keberlanjutan dan pengembangan inovasi, perlu membentuk Jejaring dan Aktor Penerapan Inovasi INFIS Persediaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna tentang Pembentukan Jejaring Penerapan Inovasi Pelayanan Publik INFIS Persediaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 23);
13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 65) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 49 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 357);

14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 68 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 68).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Jejaring dan Aktor Penerapan Inovasi Pelayanan Publik INFIS Persediaan sebagai wadah koordinasi, komunikasi, kolaborasi, pembinaan, pendampingan, monitoring, evaluasi, dan pengembangan implementasi INFIS Persediaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

KEDUA : Jejaring dan Aktor sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan untuk:

1. meningkatkan efektivitas implementasi INFIS Persediaan pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah;
2. memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam pengelolaan persediaan;
3. meningkatkan kualitas data persediaan yang akurat, lengkap, dan real time;
4. mempercepat penyelesaian permasalahan implementasi aplikasi;
5. mendukung penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. mendukung pencapaian dan keberlanjutan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

KETIGA : Jejaring dan Aktor Penerapan INFIS Persediaan terdiri atas unsur:

No	Unsur	Kedudukan
1	Sekretaris Daerah Selaku Pengelola BMD	Pembina
2	Kepala BPKPD Selaku Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola	Pengarah
3	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Ketua
4	Kepala Bidang Pengelolaan BMD	Wakil Ketua
5	Kepala Subbidang Akuntansi	Sekretaris
6	Administrator INFIS Persediaan	Koordinator Teknis
7	Pengguna Barang	Anggota
8	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	Anggota
9	Pengurus Barang Pengguna	Anggota
10	Kepala Bidang/Ruangan/PPTK	Anggota
11	Fungsi Akuntansi SKPD	Anggota
12	Operator INFIS Persediaan pada seluruh OPD	Anggota

KEEMPAT : Jejaring dan Aktor mempunyai tugas:

a. melaksanakan koordinasi implementasi INFIS Persediaan;
b. memberikan pendampingan teknis kepada seluruh pengguna;
c. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis;
d. melakukan monitoring kepatuhan penggunaan aplikasi;
e. melakukan evaluasi kualitas data persediaan;
f. mengidentifikasi hambatan implementasi serta menyusun solusi penyelesaiannya;
g. menyusun rekomendasi pengembangan aplikasi;
h. membangun forum komunikasi antaroperator;
i. mendukung integrasi INFIS Persediaan dengan sistem pemerintahan lainnya;
j. menyusun laporan pelaksanaan jejaring secara berkala.

KELIMA : Setiap anggota jejaring/aktor berkewajiban:

a. menggunakan INFIS Persediaan sesuai ketentuan;
b. menjaga kualitas data persediaan;
c. menyampaikan laporan tepat waktu;
d. berpartisipasi dalam kegiatan koordinasi;
e. memberikan masukan untuk penyempurnaan aplikasi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 30 Desember 2024

Kepala,

SURYANTO, SE. MA
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19770912 200012 1 004

Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna
Nomor : 61 Tahun 2024
Tentang : Pembentukan Jejaring dan Aktor Penerapan Inovasi Pelayanan Publik Infis Persediaan (Informasi Persediaan Terintegrasi) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna

SUSUNAN JEJARING DAN AKTOR PENERAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK INFIS PERSEDIAAN (INFORMASI PERSEDIAAN TERINTEGRASI) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

No	Nama Jabatan	Nama OPD	Nama Unit Kerja
1	Pejabat Penatausahaan Barang	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
2	Pengurus Barang	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
3	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
4	Fungsi Akuntansi SKPD	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
6	Pengurus Barang Pengguna	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
7	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	Fungsi Akuntansi SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
9	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
10	Pengurus Barang Pengguna	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
11	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
12	Fungsi Akuntansi SKPD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
13	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	
14	Pengurus Barang Pengguna	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	
15	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	
16	Fungsi Akuntansi SKPD	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	
17	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
18	Pengurus Barang Pengguna	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
19	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
20	Fungsi Akuntansi SKPD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	

No	Nama Jabatan	Nama OPD	Nama Unit Kerja
21	Fungsi Akuntansi Pemda	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
22	Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
23	Pengurus Barang Pengelola	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
24	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
25	Pengurus Barang Pengguna	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
26	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
27	Fungsi Akuntansi SKPD	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
28	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
29	Pengurus Barang Pengguna	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
30	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
31	Fungsi Akuntansi SKPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
32	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
33	Pengurus Barang Pengguna	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
34	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
35	Fungsi Akuntansi SKPD	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
36	Pejabat Penatausahaan Barang Kuasa Pengguna	Dinas Kesehatan	Puskesmas Batubi Jaya
37	Pengurus Barang Pembantu	Dinas Kesehatan	Puskesmas Batubi Jaya
38	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Dinas Kesehatan	Puskesmas Batubi Jaya
39	Fungsi Akuntansi Unit Kerja	Dinas Kesehatan	Puskesmas Batubi Jaya
40	Pejabat Penatausahaan Barang Kuasa Pengguna	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bunguran Selatan
41	Pengurus Barang Pembantu	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bunguran Selatan
42	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bunguran Selatan
43	Fungsi Akuntansi Unit Kerja	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bunguran Selatan
44	Pejabat Penatausahaan Barang Kuasa Pengguna	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bunguran Tengah
45	Pengurus Barang Pembantu	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bunguran Tengah

No	Nama Jabatan	Nama OPD	Nama Unit Kerja
46	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bunguran Tengah
47	Fungsi Akuntansi Unit Kerja	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bunguran Tengah
48	Pejabat Penatausahaan Barang Kuasa Pengguna	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kelarik
49	Pengurus Barang Pembantu	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kelarik
50	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kelarik
51	Fungsi Akuntansi Unit Kerja	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kelarik
52	Pejabat Penatausahaan Barang Kuasa Pengguna	Dinas Kesehatan	Puskesmas Midai
53	Pengurus Barang Pembantu	Dinas Kesehatan	Puskesmas Midai
54	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Dinas Kesehatan	Puskesmas Midai
55	Fungsi Akuntansi Unit Kerja	Dinas Kesehatan	Puskesmas Midai
56	Pejabat Penatausahaan Barang Kuasa Pengguna	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pulau Laut
57	Pengurus Barang Pembantu	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pulau Laut
58	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pulau Laut
59	Fungsi Akuntansi Unit Kerja	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pulau Laut
60	Pejabat Penatausahaan Barang Kuasa Pengguna	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pulau Tiga
61	Pengurus Barang Pembantu	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pulau Tiga
62	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pulau Tiga
63	Fungsi Akuntansi Unit Kerja	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pulau Tiga
64	Pejabat Penatausahaan Barang Kuasa Pengguna	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pulau Tiga Barat
65	Pengurus Barang Pembantu	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pulau Tiga Barat
66	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pulau Tiga Barat
67	Fungsi Akuntansi Unit Kerja	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pulau Tiga Barat
68	Pejabat Penatausahaan Barang Kuasa Pengguna	Dinas Kesehatan	Puskesmas Ranai
69	Pengurus Barang Pembantu	Dinas Kesehatan	Puskesmas Ranai

No	Nama Jabatan	Nama OPD	Nama Unit Kerja
70	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Dinas Kesehatan	Puskesmas Ranai
71	Fungsi Akuntansi Unit Kerja	Dinas Kesehatan	Puskesmas Ranai
72	Pejabat Penatausahaan Barang Kuasa Pengguna	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sedanau
73	Pengurus Barang Pembantu	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sedanau
74	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sedanau
75	Fungsi Akuntansi Unit Kerja	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sedanau
76	Pejabat Penatausahaan Barang Kuasa Pengguna	Dinas Kesehatan	Puskesmas Serasan
77	Pengurus Barang Pembantu	Dinas Kesehatan	Puskesmas Serasan
78	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Dinas Kesehatan	Puskesmas Serasan
79	Fungsi Akuntansi Unit Kerja	Dinas Kesehatan	Puskesmas Serasan
80	Pejabat Penatausahaan Barang Kuasa Pengguna	Dinas Kesehatan	Puskesmas Serasan Timur
81	Pengurus Barang Pembantu	Dinas Kesehatan	Puskesmas Serasan Timur
82	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Dinas Kesehatan	Puskesmas Serasan Timur
83	Fungsi Akuntansi Unit Kerja	Dinas Kesehatan	Puskesmas Serasan Timur
84	Pejabat Penatausahaan Barang Kuasa Pengguna	Dinas Kesehatan	Puskesmas Suak Midai
85	Pengurus Barang Pembantu	Dinas Kesehatan	Puskesmas Suak Midai
86	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Dinas Kesehatan	Puskesmas Suak Midai
87	Fungsi Akuntansi Unit Kerja	Dinas Kesehatan	Puskesmas Suak Midai
88	Pejabat Penatausahaan Barang Kuasa Pengguna	Dinas Kesehatan	Puskesmas Subi
89	Pengurus Barang Pembantu	Dinas Kesehatan	Puskesmas Subi
90	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Dinas Kesehatan	Puskesmas Subi
91	Fungsi Akuntansi Unit Kerja	Dinas Kesehatan	Puskesmas Subi
92	Pejabat Penatausahaan Barang Kuasa Pengguna	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tanjung
93	Pengurus Barang Pembantu	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tanjung

No	Nama Jabatan	Nama OPD	Nama Unit Kerja
94	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tanjung
95	Fungsi Akuntansi Unit Kerja	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tanjung
96	Pejabat Penatausahaan Barang Kuasa Pengguna	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Natuna
97	Pengurus Barang Pembantu	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Natuna
98	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Natuna
99	Fungsi Akuntansi Unit Kerja	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Natuna
100	Pejabat Penatausahaan Barang Kuasa Pengguna	Dinas Kesehatan	UPT Instalasi Farmasi
101	Pengurus Barang Pembantu	Dinas Kesehatan	UPT Instalasi Farmasi
102	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Dinas Kesehatan	UPT Instalasi Farmasi
103	Fungsi Akuntansi Unit Kerja	Dinas Kesehatan	UPT Instalasi Farmasi
104	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
105	Pengurus Barang Pengguna	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
106	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
107	Fungsi Akuntansi SKPD	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
108	Pejabat Penatausahaan Barang Kuasa Pengguna	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	UPT Balai Benih Utama
109	Pengurus Barang Pembantu	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	UPT Balai Benih Utama
110	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	UPT Balai Benih Utama
111	Fungsi Akuntansi Unit Kerja	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	UPT Balai Benih Utama
112	Pejabat Penatausahaan Barang Kuasa Pengguna	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	UPT Balai Penyuluh Pertanian
113	Pengurus Barang Pembantu	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	UPT Balai Penyuluh Pertanian
114	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	UPT Balai Penyuluh Pertanian
115	Fungsi Akuntansi Unit Kerja	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	UPT Balai Penyuluh Pertanian
116	Pejabat Penatausahaan Barang Kuasa Pengguna	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	UPT Pusat Kesehatan Hewan
117	Pengurus Barang Pembantu	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	UPT Pusat Kesehatan Hewan

No	Nama Jabatan	Nama OPD	Nama Unit Kerja
118	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	UPT Pusat Kesehatan Hewan
119	Fungsi Akuntansi Unit Kerja	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	UPT Pusat Kesehatan Hewan
120	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	Dinas Komunikasi dan Informatika	
121	Pengurus Barang Pengguna	Dinas Komunikasi dan Informatika	
122	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Dinas Komunikasi dan Informatika	
123	Fungsi Akuntansi SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	
124	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	Dinas Lingkungan Hidup	
125	Pengurus Barang Pengguna	Dinas Lingkungan Hidup	
126	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Dinas Lingkungan Hidup	
127	Fungsi Akuntansi SKPD	Dinas Lingkungan Hidup	
128	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	Dinas Pariwisata	
129	Pengurus Barang Pengguna	Dinas Pariwisata	
130	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Dinas Pariwisata	
131	Fungsi Akuntansi SKPD	Dinas Pariwisata	
132	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
133	Pengurus Barang Pengguna	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
134	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
135	Fungsi Akuntansi SKPD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
136	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
137	Pengurus Barang Pengguna	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
138	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
139	Fungsi Akuntansi SKPD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
140	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
141	Pengurus Barang Pengguna	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
142	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
143	Fungsi Akuntansi SKPD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

No	Nama Jabatan	Nama OPD	Nama Unit Kerja
144	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
145	Pengurus Barang Pengguna	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
146	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
147	Fungsi Akuntansi SKPD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
148	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	Dinas Pemuda dan Olahraga	
149	Pengurus Barang Pengguna	Dinas Pemuda dan Olahraga	
150	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Dinas Pemuda dan Olahraga	
151	Fungsi Akuntansi SKPD	Dinas Pemuda dan Olahraga	
152	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
153	Pengurus Barang Pengguna	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
154	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
155	Fungsi Akuntansi SKPD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
156	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
157	Pengurus Barang Pengguna	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
158	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
159	Fungsi Akuntansi SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
160	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	Dinas Perhubungan	
161	Pengurus Barang Pengguna	Dinas Perhubungan	
162	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Dinas Perhubungan	
163	Fungsi Akuntansi SKPD	Dinas Perhubungan	
164	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
165	Pengurus Barang Pengguna	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
166	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
167	Fungsi Akuntansi SKPD	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
168	Pejabat Penatausahaan Barang Kuasa Pengguna	Dinas Perikanan	UPT Balai Benih Ikan

No	Nama Jabatan	Nama OPD	Nama Unit Kerja
169	Pengurus Barang Pembantu	Dinas Perikanan	UPT Balai Benih Ikan
170	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Dinas Perikanan	UPT Balai Benih Ikan
171	Fungsi Akuntansi Unit Kerja	Dinas Perikanan	UPT Balai Benih Ikan
172	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
173	Pengurus Barang Pengguna	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
174	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
175	Fungsi Akuntansi SKPD	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
176	Pejabat Penatausahaan Barang Kuasa Pengguna	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	UPTD Metrologi Legal
177	Pengurus Barang Pembantu	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	UPTD Metrologi Legal
178	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	UPTD Metrologi Legal
179	Fungsi Akuntansi Unit Kerja	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	UPTD Metrologi Legal
180	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
181	Pengurus Barang Pengguna	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
182	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
183	Fungsi Akuntansi SKPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
184	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
185	Pengurus Barang Pengguna	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
186	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
187	Fungsi Akuntansi SKPD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
188	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	Dinas Sosial	
189	Pengurus Barang Pengguna	Dinas Sosial	
190	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Dinas Sosial	
191	Fungsi Akuntansi SKPD	Dinas Sosial	
192	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
193	Pengurus Barang Pengguna	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Nama Jabatan	Nama OPD	Nama Unit Kerja
194	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
195	Fungsi Akuntansi SKPD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
196	Pejabat Penatausahaan Barang Kuasa Pengguna	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	UPTD Balai Latihan Kerja
197	Pengurus Barang Pembantu	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	UPTD Balai Latihan Kerja
198	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	UPTD Balai Latihan Kerja
199	Fungsi Akuntansi Unit Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	UPTD Balai Latihan Kerja
200	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	Inspektorat Daerah	
201	Pengurus Barang Pengguna	Inspektorat Daerah	
202	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Inspektorat Daerah	
203	Fungsi Akuntansi SKPD	Inspektorat Daerah	
204	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	Kecamatan Bunguran Barat	Kecamatan Bunguran Barat
205	Pengurus Barang Pengguna	Kecamatan Bunguran Barat	Kecamatan Bunguran Barat
206	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Kecamatan Bunguran Barat	Kecamatan Bunguran Barat
207	Fungsi Akuntansi SKPD	Kecamatan Bunguran Barat	Kecamatan Bunguran Barat
208	Pejabat Penatausahaan Barang Kuasa Pengguna	Kecamatan Bunguran Barat	Kelurahan Sedanau
209	Pengurus Barang Pembantu	Kecamatan Bunguran Barat	Kelurahan Sedanau
210	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Kecamatan Bunguran Barat	Kelurahan Sedanau
211	Fungsi Akuntansi Unit Kerja	Kecamatan Bunguran Barat	Kelurahan Sedanau
212	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	Kecamatan Bunguran Batubi	
213	Pengurus Barang Pengguna	Kecamatan Bunguran Batubi	
214	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Kecamatan Bunguran Batubi	
215	Fungsi Akuntansi SKPD	Kecamatan Bunguran Batubi	
216	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	Kecamatan Bunguran Selatan	
217	Pengurus Barang Pengguna	Kecamatan Bunguran Selatan	
218	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Kecamatan Bunguran Selatan	
219	Fungsi Akuntansi SKPD	Kecamatan Bunguran Selatan	

No	Nama Jabatan	Nama OPD	Nama Unit Kerja
220	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	Kecamatan Bunguran Tengah	
221	Pengurus Barang Pengguna	Kecamatan Bunguran Tengah	
222	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Kecamatan Bunguran Tengah	
223	Fungsi Akuntansi SKPD	Kecamatan Bunguran Tengah	
224	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	Kecamatan Bunguran Timur	Kecamatan Bunguran Timur
225	Pengurus Barang Pengguna	Kecamatan Bunguran Timur	Kecamatan Bunguran Timur
226	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Kecamatan Bunguran Timur	Kecamatan Bunguran Timur
227	Fungsi Akuntansi SKPD	Kecamatan Bunguran Timur	Kecamatan Bunguran Timur
228	Pejabat Penatausahaan Barang Kuasa Pengguna	Kecamatan Bunguran Timur	Kelurahan Bandarsyah
229	Pengurus Barang Pembantu	Kecamatan Bunguran Timur	Kelurahan Bandarsyah
230	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Kecamatan Bunguran Timur	Kelurahan Bandarsyah
231	Fungsi Akuntansi Unit Kerja	Kecamatan Bunguran Timur	Kelurahan Bandarsyah
232	Pejabat Penatausahaan Barang Kuasa Pengguna	Kecamatan Bunguran Timur	Kelurahan Batu Hitam
233	Pengurus Barang Pembantu	Kecamatan Bunguran Timur	Kelurahan Batu Hitam
234	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Kecamatan Bunguran Timur	Kelurahan Batu Hitam
235	Fungsi Akuntansi Unit Kerja	Kecamatan Bunguran Timur	Kelurahan Batu Hitam
236	Pejabat Penatausahaan Barang Kuasa Pengguna	Kecamatan Bunguran Timur	Kelurahan Ranai
237	Pengurus Barang Pembantu	Kecamatan Bunguran Timur	Kelurahan Ranai
238	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Kecamatan Bunguran Timur	Kelurahan Ranai
239	Fungsi Akuntansi Unit Kerja	Kecamatan Bunguran Timur	Kelurahan Ranai
240	Pejabat Penatausahaan Barang Kuasa Pengguna	Kecamatan Bunguran Timur	Kelurahan Ranai Darat
241	Pengurus Barang Pembantu	Kecamatan Bunguran Timur	Kelurahan Ranai Darat
242	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Kecamatan Bunguran Timur	Kelurahan Ranai Darat
243	Fungsi Akuntansi Unit Kerja	Kecamatan Bunguran Timur	Kelurahan Ranai Darat
244	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	Kecamatan Bunguran Timur Laut	

No	Nama Jabatan	Nama OPD	Nama Unit Kerja
245	Pengurus Barang Pengguna	Kecamatan Bunguran Timur Laut	
246	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Kecamatan Bunguran Timur Laut	
247	Fungsi Akuntansi SKPD	Kecamatan Bunguran Timur Laut	
248	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	Kecamatan Bunguran Utara	
249	Pengurus Barang Pengguna	Kecamatan Bunguran Utara	
250	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Kecamatan Bunguran Utara	
251	Fungsi Akuntansi SKPD	Kecamatan Bunguran Utara	
252	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	Kecamatan Midai	Kecamatan Midai
253	Pengurus Barang Pengguna	Kecamatan Midai	Kecamatan Midai
254	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Kecamatan Midai	Kecamatan Midai
255	Fungsi Akuntansi SKPD	Kecamatan Midai	Kecamatan Midai
256	Pejabat Penatausahaan Barang Kuasa Pengguna	Kecamatan Midai	Kelurahan Sabang Barat
257	Pengurus Barang Pembantu	Kecamatan Midai	Kelurahan Sabang Barat
258	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Kecamatan Midai	Kelurahan Sabang Barat
259	Fungsi Akuntansi Unit Kerja	Kecamatan Midai	Kelurahan Sabang Barat
260	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	Kecamatan Pulau Laut	
261	Pengurus Barang Pengguna	Kecamatan Pulau Laut	
262	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Kecamatan Pulau Laut	
263	Fungsi Akuntansi SKPD	Kecamatan Pulau Laut	
264	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	Kecamatan Pulau Panjang	
265	Pengurus Barang Pengguna	Kecamatan Pulau Panjang	
266	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Kecamatan Pulau Panjang	
267	Fungsi Akuntansi SKPD	Kecamatan Pulau Panjang	
268	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	Kecamatan Pulau Seluan	
269	Pengurus Barang Pengguna	Kecamatan Pulau Seluan	
270	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Kecamatan Pulau Seluan	

No	Nama Jabatan	Nama OPD	Nama Unit Kerja
271	Fungsi Akuntansi SKPD	Kecamatan Pulau Seluan	
272	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	Kecamatan Pulau Tiga	
273	Pengurus Barang Pengguna	Kecamatan Pulau Tiga	
274	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Kecamatan Pulau Tiga	
275	Fungsi Akuntansi SKPD	Kecamatan Pulau Tiga	
276	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	Kecamatan Pulau Tiga Barat	
277	Pengurus Barang Pengguna	Kecamatan Pulau Tiga Barat	
278	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Kecamatan Pulau Tiga Barat	
279	Fungsi Akuntansi SKPD	Kecamatan Pulau Tiga Barat	
280	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	Kecamatan Serasan	Kecamatan Serasan
281	Pengurus Barang Pengguna	Kecamatan Serasan	Kecamatan Serasan
282	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Kecamatan Serasan	Kecamatan Serasan
283	Fungsi Akuntansi SKPD	Kecamatan Serasan	Kecamatan Serasan
284	Pejabat Penatausahaan Barang Kuasa Pengguna	Kecamatan Serasan	Kelurahan Serasan
285	Pengurus Barang Pembantu	Kecamatan Serasan	Kelurahan Serasan
286	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Kecamatan Serasan	Kelurahan Serasan
287	Fungsi Akuntansi Unit Kerja	Kecamatan Serasan	Kelurahan Serasan
288	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	Kecamatan Serasan Timur	
289	Pengurus Barang Pengguna	Kecamatan Serasan Timur	
290	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Kecamatan Serasan Timur	
291	Fungsi Akuntansi SKPD	Kecamatan Serasan Timur	
292	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	Kecamatan Suak Midai	
293	Pengurus Barang Pengguna	Kecamatan Suak Midai	
294	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Kecamatan Suak Midai	
295	Fungsi Akuntansi SKPD	Kecamatan Suak Midai	
296	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	Kecamatan Subi	

No	Nama Jabatan	Nama OPD	Nama Unit Kerja
297	Pengurus Barang Pengguna	Kecamatan Subi	
298	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Kecamatan Subi	
299	Fungsi Akuntansi SKPD	Kecamatan Subi	
300	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	
301	Pengurus Barang Pengguna	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	
302	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	
303	Fungsi Akuntansi SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	
304	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
305	Pengurus Barang Pengguna	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
306	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
307	Fungsi Akuntansi SKPD	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
308	Pengelola Barang	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
309	Pejabat Penatausahaan Barang Kuasa Pengguna	Sekretariat Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan
310	Pengurus Barang Pembantu	Sekretariat Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan
311	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Sekretariat Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan
312	Fungsi Akuntansi Unit Kerja	Sekretariat Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan
313	Pejabat Penatausahaan Barang Kuasa Pengguna	Sekretariat Daerah	Bagian Hukum
314	Pengurus Barang Pembantu	Sekretariat Daerah	Bagian Hukum
315	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Sekretariat Daerah	Bagian Hukum
316	Fungsi Akuntansi Unit Kerja	Sekretariat Daerah	Bagian Hukum
317	Pejabat Penatausahaan Barang Kuasa Pengguna	Sekretariat Daerah	Bagian Kerjasama
318	Pengurus Barang Pembantu	Sekretariat Daerah	Bagian Kerjasama
319	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Sekretariat Daerah	Bagian Kerjasama
320	Fungsi Akuntansi Unit Kerja	Sekretariat Daerah	Bagian Kerjasama
321	Pejabat Penatausahaan Barang Kuasa Pengguna	Sekretariat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat
322	Pengurus Barang Pembantu	Sekretariat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat

No	Nama Jabatan	Nama OPD	Nama Unit Kerja
323	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Sekretariat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat
324	Fungsi Akuntansi Unit Kerja	Sekretariat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat
325	Pejabat Penatausahaan Barang Kuasa Pengguna	Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi
326	Pengurus Barang Pembantu	Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi
327	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi
328	Fungsi Akuntansi Unit Kerja	Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi
329	Pejabat Penatausahaan Barang Kuasa Pengguna	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
330	Pengurus Barang Pembantu	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
331	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
332	Fungsi Akuntansi Unit Kerja	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
333	Pejabat Penatausahaan Barang Kuasa Pengguna	Sekretariat Daerah	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
334	Pengurus Barang Pembantu	Sekretariat Daerah	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
335	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Sekretariat Daerah	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
336	Fungsi Akuntansi Unit Kerja	Sekretariat Daerah	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
337	Pejabat Penatausahaan Barang Kuasa Pengguna	Sekretariat Daerah	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
338	Pengurus Barang Pembantu	Sekretariat Daerah	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
339	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Sekretariat Daerah	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
340	Fungsi Akuntansi Unit Kerja	Sekretariat Daerah	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
341	Pejabat Penatausahaan Barang Kuasa Pengguna	Sekretariat Daerah	Bagian Tata Pemerintahan
342	Pengurus Barang Pembantu	Sekretariat Daerah	Bagian Tata Pemerintahan
343	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Sekretariat Daerah	Bagian Tata Pemerintahan
344	Fungsi Akuntansi Unit Kerja	Sekretariat Daerah	Bagian Tata Pemerintahan
345	Pejabat Penatausahaan Barang Kuasa Pengguna	Sekretariat Daerah	Bagian Umum
346	Pengurus Barang Pembantu	Sekretariat Daerah	Bagian Umum

No	Nama Jabatan	Nama OPD	Nama Unit Kerja
347	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Sekretariat Daerah	Bagian Umum
348	Fungsi Akuntansi Unit Kerja	Sekretariat Daerah	Bagian Umum
349	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	Sekretariat DPRD	
350	Pengurus Barang Pengguna	Sekretariat DPRD	
351	Kepala Bidang/Ruangan/ PPTK	Sekretariat DPRD	
352	Fungsi Akuntansi SKPD	Sekretariat DPRD	

Kepala,

SUPYANTO, SE. MA
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19770912 200012 1 004